

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN LAPORAN  
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)  
KEPALA DAERAH DALAM PERSPEKTIF  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Diajukan untuk melengkapi persyaratan dalam menyelesaikan Pendidikan Strata 1  
Program Studi Ilmu Hukum Ruang Lingkup HAN/HTN



Oleh :

**SUPRIYONO**

**NIM : 2009-20-075**

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MURIA KUDUS  
TAHUN 2013

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN LAPORAN  
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)  
KEPALA DAERAH DALAM PERSPEKTIF  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi persyaratan dalam menyelesaikan Pendidikan Strata 1  
Program Studi Ilmu Hukum Ruang Lingkup HAN/HTN


Oleh :

SUPRIYONO  
NIM : 2009-20-075

Kudus, September 2013

Menyetujui :

Dosen Pembimbing I

  
RISTAMADJI, SH, MH

Dosen Pembimbing II

  
SUMONO, SH

Mengetahui



Dekan Fakultas Hukum UMK

  
RISTAMADJI, SH, MH

## **SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan dibawah ini, Nama : SUPRIYONO, NIM : 2009-20-075, dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan didalam skripsi ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi/ Lembaga Pendidikan manapun. Pengambilan karya orang lain dalam skripsi ini dilakukan dengan menyebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam kutipan, catatan kaki dan dalam daftar pustaka.
2. Apabila pernyataan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas ternyata tidak benar, saya bersedia bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kudus, September 2013

Yang menyatakan,

SUPRIYONO

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas Rahmat dan KaruniaNya yang pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul “Tinjauan Yuridis Pengaturan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Dalam Perspektif Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”, akan tetapi penulis sadari meskipun banyak masukan, arahan, bimbingan yang diberikan Bapak Dosen Pembimbing sebagai upaya penyempurnaan dalam penyusunan Skripsi ini, namun penulis rasakan bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan. Hal ini merupakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis, dan bukan merupakan suatu kesengajaan.

Dengan segala kerendahan hati yang tulus penulis mengharapkan adanya masukan, kritik serta saran yang bersifat membangun guna kesempurnaan Skripsi ini.

Dalam kesempatan yang baik ini dan dengan kerendahan hati serta penuh rasa hormat yang tinggi penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar – besarnya, kepada yang terhormat :

1. Bapak Ristamadji, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus dan sekaligus sebagai Pembimbing I dalam Skripsi ini, yang telah dengan tekun dan sabar membimbing kami sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
2. Bapak Sumono, S.H. sebagai Pembimbing II dalam Skripsi ini, yang telah dengan tekun dan sabar membimbing kami sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
3. Bapak Ibu Pejabat Struktural Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus yang selama kami belajar telah dengan sabar melayani kami sampai dengan selesainya skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus yang telah membina dan mengasuh kami sehingga dapat lulus dengan tiada mengalami hambatan suatu apa.
5. Semua Staf Sekretariat Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus yang selama kami belajar telah dengan tulus melayani kebutuhan administrasi kami.

6. Ketua DPRD Kabupaten Kudus dan seluruh Fraksi, Komisi, dan seluruh anggotanya yang telah melayani data yang kami butuhkan, sehingga dapat diselesaikannya skripsi ini.
7. Segenap Sekretariat Dewan DPRD Kabupaten Kudus, yang telah dengan tulus melayani kebutuhan data, sehingga dapat diselesaikannya skripsi ini.

Tidak lupa pula terima kasih kami sampaikan kepada :

- Kepada anak dan istriku, yang selalu setia memberikan dorongan semangat serta doa yang tak pernah henti, sehingga ALLAH SWT memberikan jalan kemudahan bagi selesainya skripsi ini.
- Teman-teman seangkatan tahun 2009 yang selalu bersilahturahim saling memberikan semangat sehingga dapat diselesaikannya skripsi ini.
- Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu kelancaran dan keberhasilan penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Akhirnya besar harapan penulis agar Skripsi ini dapat bernilai strategis dan bermanfaat bagi siapapun yang membaca dan menggunakannya untuk kepentingan dan kemajuan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Bilahi taufiq wal hidayah, Wassalamualaikum Wr. Wb.

Kudus, September 2013

Hormat kami,

Penulis,

SUPRIYONO



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Kalimat bijak :

Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu akan menjaga engkau dan engkau menjaga harta. Ilmu itu penghukum (hakim) sedangkan harta terhukum. Kalau harta itu akan berkurang apabila dibelanjakan, tetapi ilmu akan bertambah apabila dibelanjakan. (Sayidina Ali bin Abi Thalib)

*Ku persembahkan karya ilmiah ini kepada :  
Orang Tuaku dan Mertuaku  
Anak-anak dan isteriku tersayang  
Rekan seangkatan, dan  
Almamaterku*



## ABSTRAK SKRIPSI

Penelitian dalam skripsi ini berjudul “Tinjauan Yuridis Pengaturan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Dalam Perspektif Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”. Semenjak berlakunya UU No. 32 Tahun 2004, Kepala Daerah tidak lagi bertanggungjawab kepada DPRD, tetapi kepada Menteri Dalam Negeri untuk Bupati/Walikota dan kepada Presiden untuk Gubernur. DPRD hanya menerima LKPJ dan memberikan rekomendasi sebagai masukan.

Permasalahan yang diteliti :1) pengaturan LKPJ Kepala Daerah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2) kedudukan LKPJ Kepala Daerah ditinjau dari perspektif penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan 3) implikasi yuridis LKPJ Kepala Daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penelitian skripsi ini tipologi normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Jadi cukup dengan data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Pengaturan LKPJ Kepala Daerah Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 merupakan kewajiban yang bersifat mengikat secara yuridis sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk dilakukan pada akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan berdasarkan RPJMD serta sesuai dengan RPJPD. Oleh karena itu dalam pengaturan LKPJ berdasarkan UU seharusnya pendapat DPRD dapat merekomendasikan diberhentikan tidak sebatas rekomendasi koreksi; 2) LKPJ secara fungsional merupakan laporan kinerja yang telah dibahas bersama DPRD, karena DPRD merupakan mitra kerja pemerintah daerah yang harus membahas atas LKPJ kepala daerah tersebut dalam tenggang waktu tertentu (selama 30 hari) sehingga dapat menghasilkan pendapat DPRD. Dan dengan LKPJ ini adalah bagian dari pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada rakyat telah memilih/mengangkat sesuai dengan hakikat prinsip pemerintahan yang demokratis/berkedaulatan rakyat; 3) LKPJ kepala daerah melalui pendapat DPRD sesuai dengan hasil evaluasi dapat berimplikasi dalam bentuk koreksi dan lebih tepat disebut rekomendasi untuk diperbaiki dan memungkinkan diberhentikan melalui prosedur tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Saran yang diberikan : 1) Kepada Pemerintah (Pusat) : perlu adanya pengaturan lebih lanjut terhadap LKPJ Kepala Daerah yang bersifat tegas yang memuat implikasi yuridis tanpa adanya celah hukum yang menimbulkan penafsiran-penafsiran berbeda terhadap sebuah regulasi-regulasi, terutama substansi LKPJ; 2) Kepada Kepala Daerah : terkait dengan LKPJ Kepala daerah baik akhir masa jabatan dan LKPJ akhir tahun anggaran, jika dikaitkan dengan PP No. 3 Tahun 2007 masih ada sisi lemahnya. Maka dengan itu untuk mencapai pemerintahan daerah yang akuntabel diharapkan agar memperhatikan kembali ketentuan-ketentuan Pasal terkait dengan LKPJ kepala daerah; 3) Kepada DPR : pentingnya kecermatan DPR terhadap Kepala Daerah untuk melakukan penyempurnaan atas pertanggungjawaban tersebut, sebagai bentuk implikasi yuridis terhadap LKPJ Kepala Daerah atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Kata kunci : LKPJ, Kepala Daerah, DPRD.

## DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iii
HALAMAN KATA PENGANTAR .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
ABSTRAK SKRIPSI .....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	7
E. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pemerintahan Daerah .....	10
1. Pengertian Pemerintahan Daerah .....	10
2. Penyelenggara Pemerintahan Daerah .....	10
3. Hak-hak dan Kewajiban Pemerintahan Daerah .....	11
4. Urusan-urusan Pemerintahan Daerah .....	12
5. Asas Desentralisasi .....	13
6. Prinsip Otonomi Daerah .....	17
7. Konsep Pembentukan Pemerintahan Daerah .....	19



8. Dasar Pembentukan Pemerintahan Daerah . . . . .	20
B. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah. . . . .	23
C. Pengertian dan Ruang Lingkup Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah . . . . .	30
D. Jenis LKPJ Kepala Daerah . . . . .	34
1. LKPJ Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran. . . . .	34
2. LKPJ Kepala Daerah Akhir Masa Jabatan . . . . .	35
3. Pertanggungjawaban Kepala Daerah Terhadap APBD . . . . .	35
4. Pertanggungjawaban Kepala Daerah Dalam Hal Tertentu . . . .	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Metode Pendekatan . . . . .	38
B. Spesifikasi Penelitian . . . . .	40
C. Metode Pengumpulan Data . . . . .	40
D. Metode Pengolahan dan Penyajian data . . . . .	42
E. Metode Analisis Data . . . . .	42
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Pengaturan LKPJ Kepala Daerah Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan . . . . .	43
B. LKPJ Kepala Daerah Ditinjau Dari Perspektif Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. . . . .	47
C. Implikasi Yuridis LKPJ Kepala Daerah Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah . . . . .	58
1. Fungsi DPRD Terhadap LKPJ Kepala Daerah. . . . .	58
2. Tolok Ukur Kinerja Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan	

Pemerintahan Daerah .....	69
3. Dasar Akuntabilitas Pertanghgungjawaban Kepala Daerah ...	73
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan .....	77
B. Saran .....	78
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

